

ISSN: 2087-7900

JURNAL
POLITICA

DINAMIKA MASALAH POLITIK DALAM NEGERI & HUBUNGAN INTERNASIONAL

VOL. 7 NO.1, MEI 2016

Penanggung Jawab:

Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.

Pemimpin Redaksi:

Prof. Dr.phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A. (Hubungan Internasional)

Dewan Redaksi:

Drs. Simela Victor Muhamad, M.Si. (Hubungan Internasional)

Riris Katharina, S.Sos., M.Si. (Administrasi Negara)

Dra. Adirini Pujayanti, M.Si. (Hubungan Internasional)

Drs. Ahmad Budiman, M. Pd. (Komunikasi Politik)

Pelaksana Redaksi:

Lisbet, S.IP., M.Si.

Rizki Roza, S.IP, M.Si.

Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.

Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.

Dewi Sendhikasari D., S.IP., Mpa.

Staff Redaksi:

Sri Rejeki, S.E., Yeti Ifana, S.E., Supriyanto

Mitra Bestari:

DR. Lili Romli, M.Si. (Perkembangan Politik Nasional, LIPI)

DR. Ganewati Wuryandari, MA. (Hubungan Internasional, LIPI)

Dr. Riant Nugroho (Kebijakan Publik, UI)

Dr. phil. Yandry Kurniawan Kasim (Hubungan Internasional, UI)

Alamat Redaksi/Tata Usaha :

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

Sekretariat Jenderal DPR RI Gedung Nusantara I, Lt. 2

Jl. Jend. Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, 10270

Telp : 021-5755987 Fax : 021-5756067

Email : jurnal.politica@dpr.go.id

Penyunting menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media lain.

Naskah diketik sesuai dengan format yang tercantum pada halaman belakang

(Lihat pedoman penulisan)

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Kata Pengantar	iii-iv
Abstrak.....	v-x
Peran Kapital dan Gagalnya Konsolidasi Demokratis Indonesia: Pendekatan Ekonomi Politik <i>oleh: Poltak Partogi Nainggolan</i>	1-24
Upaya Penanggulangan Terorisme ISIS di Indonesia dalam Melindungi Keamanan Nasional <i>oleh: Debora Sanur L</i>	25-47
Partisipasi Politik Masyarakat dalam Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam (Studi tentang Konsultasi Publik Masalah Pertambangan di Provinsi Bangka-Belitung dan Provinsi Kalimantan Timur) <i>oleh: Prayudi</i>	48-77
Peran Daerah dalam Diplomasi Ekonomi <i>oleh: Adirini Pujayanti</i>	78-101
Kebijakan Perberasan Indonesia dan Solidaritas Pangan ASEAN <i>oleh: Iwan Hermawan</i>	102-120
Isu Keamanan di Semenanjung Korea dan Upaya Damai Parlemen <i>oleh: Simela Victor Muhamad</i>	121-143
Pedoman Penulisan	

PENGANTAR REDAKSI

Jurnal Politica, yang terbit secara berkala setahun dua kali, kembali hadir diterbitkan pertama tahun 2016, melalui Volume 7, Nomor 1, Mei 2016. *Jurnal Politica* yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI (sebelumnya bernama Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi/P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI), adalah wadah bagi tulisan-tulisan ilmiah hasil kajian dan penelitian tentang masalah-masalah strategis di bidang politik dalam negeri dan hubungan internasional. Jurnal ini juga merupakan sarana bagi para peneliti, akademisi, dan praktisi untuk menuangkan gagasan dan ide-ide sekaligus sumber inspirasi khususnya terkait dengan proses pengambilan kebijakan, termasuk dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pada edisi kali ini terdapat 6 (enam) tulisan yang mengkaji beberapa persoalan yang dibahas secara mendalam oleh beberapa penulis yang menyangkut isu-isu strategis nasional maupun internasional (khususnya kawasan), yakni: peran kapital dan gagalnya konsolidasi demokratis Indonesia; upaya penanggulangan terorisme ISIS di Indonesia; partisipasi politik masyarakat dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam; peran daerah dalam diplomasi ekonomi; kebijakan perberasan Indonesia dan solidaritas pangan ASEAN; serta isu keamanan di Semenanjung Korea dan upaya damai parlemen.

Tulisan pertama disampaikan oleh Poltak Partogi Nainggolan. Dengan menggunakan pendekatan ekonomi-politik, penulis mempresentasikan sebuah analisis kritis mengenai perkembangan politik di Indonesia pasca-Soeharto. Penulis mengkritik para institusionalis, khususnya Indonesianis, yang mempertahankan cara pandang mereka dalam memahami Indonesia. Dibandingkan dengan institusionalisme, pendekatan ekonomi politik, menurut penulis, lebih menolong dalam memberikan penjelasan yang lebih baik, mengapa modal atau politik uang semakin dominan mengontrol perkembangan politik Indonesia pasca-1998, sehingga telah menyebabkan kegagalannya dalam mewujudkan konsolidasi demokratis dalam beberapa tahun sesudahnya. Penulis mengemukakan mengenai pentingnya sebuah solusi sosialis atas praktek demokrasi liberal Barat dan model pembangunan kapitalisnya, serta neo-feodalisme, neo-liberalisme, dan bentuk-bentuk baru oligarki yang muncul di negara demokrasi baru seperti Indonesia. Dengan demikian, solusi terhadap permasalahan sistem politik dan kekuasaan di Indonesia tidak lagi bersifat institusional di permukaan, namun efektif menjawab akar permasalahannya.

Tulisan kedua disampaikan oleh Debora Sanur L. Penulis mengemukakan bahwa gerakan teror, terutama yang terkait Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), telah membuat sebagian besar negara di dunia waspada. Sama seperti halnya negara lain, menurut penulis, Indonesia juga menemui tantangan dalam menangani kelompok teror jaringan ISIS. Melalui tulisan ini, penulis mengkaji sejauh mana perkembangan terorisme, terutama terkait ISIS, mengancam keamanan nasional bangsa, dan bagaimana seharusnya Indonesia menanggulangi ancaman terorisme tersebut. Dalam kerangka keamanan nasional, penulis berpandangan, diperlukan strategi yang tepat sasaran dan regulasi yang tepat untuk meningkatkan efektifitas upaya penanggulangan terorisme di Indonesia.

Tulisan ketiga disampaikan oleh Prayudi. Tulisan hasil penelitian ini mendeskripsikan perkembangan partisipasi politik warga masyarakat terhadap pengelolaan asset sumber daya alam (SDA) pertambangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah (pemda), dan menganalisis dampak yang ditimbulkan dari partisipasi politik warga masyarakat melalui bentuk konsultasi publik yang dilakukannya terkait perizinan dalam pengelolaan tambang oleh pemda. Berdasarkan studi di Bangka Belitung dan Kalimantan Timur, tulisan ini mengungkapkan bahwa konsultasi publik mengenai kebijakan pertambangan masih lemah dampaknya bagi tata kelola kebijakan yang baik

dan praktek pertambangan. Tulisan ini mengusulkan agar pengaturan utama tambang harus di bawah Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebagai payung hukumnya dan bukan tersebar mengikuti pengaturan secara sektoral dalam mengelola operasi tambang.

Tulisan keempat, yang disampaikan oleh Adirini Pujayanti, membahas peran daerah dalam diplomasi ekonomi. Tulisan hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa paradiplomasi dengan pelibatan pemerintah daerah sebagai bagian dari diplomasi multijalur Indonesia merupakan tuntutan riil dalam hubungan internasional di era globalisasi. Dalam paradiplomasi terdapat korelasi erat dan timbal balik antara dinamika hubungan internasional dan realitas domestik yang diperlukan untuk menempatkan substansi permasalahan diplomasi ekonomi secara integratif dan intermestik. Paradiplomasi di bidang ekonomi dapat menjadi bagian dari strategi kebijakan luar negeri Indonesia guna mencapai tujuan-tujuan ekonomi. Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian penulis, paradiplomasi belum berjalan secara efektif karena belum terpadunya kepentingan pusat dan daerah.

Tulisan kelima disampaikan oleh Iwan Hermawan. Tulisan mengulas perkembangan kebijakan perberasan di Indonesia dan mengkaji solidaritas pangan (beras) ASEAN dalam mendukung ketersediaan beras di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan perberasan mengalami perubahan secara dinamis mulai dari rezim orde lama hingga saat ini. Menurut penulis, kebijakan stabilisasi harga padi/beras menjadi kebijakan yang utama namun cenderung ditujukan untuk menjaga inflasi atau untuk kepentingan konsumen. Penulis juga menyebutkan, ketika ketersediaan beras melalui swasembada beras sulit diwujudkan, kerja sama pangan ASEAN menjadi opsi yang sangat potensial untuk mendukung kebijakan perberasan di Indonesia, khususnya dalam rangka mendukung stabilisasi harga.

Tulisan terakhir, keenam, disampaikan oleh Simela Victor Muhamad. Tulisan mengkaji salah satu isu keamanan kawasan yang hingga kini masih menjadi keprihatinan masyarakat internasional, yakni keamanan di Semenanjung Korea yang belum kondusif, dan bagaimana parlemen melakukan perannya dalam mendukung upaya damai di kawasan tersebut. Menurut penulis, parlemen, sebagai salah satu aktor hubungan internasional di luar pemerintah, dan dalam kerangka *network diplomacy*, dapat berpartisipasi dalam mendukung upaya damai atas masalah keamanan di Semenanjung Korea. Upaya damai tersebut dilakukan parlemen melalui forum-forum internasional yang tersedia, khususnya forum antar-parlemen, dan juga dengan memanfaatkan jejaring diplomasi yang dimilikinya. Melalui tulisan ini, penulis mencoba membahas upaya damai parlemen atas masalah keamanan di Semenanjung Korea, terutama dalam kerangka pelaksanaan diplomasi parlemen APPF, baik yang dilakukan secara kelembagaan maupun individual anggota parlemen.

Demikian pengantar redaksi atas 6 (enam) tulisan yang tersaji dalam *Jurnal Politica* edisi kali ini. Redaksi berharap, ke semua tulisan yang tersaji tersebut dapat menjadi bahan informasi dan memberikan inspirasi serta alternatif solusi bagi pengambil kebijakan dalam proses pengambilan keputusan, dan tentunya juga memberikan manfaat yang besar bagi pembaca, khususnya dari kalangan peneliti dan akademik, yang tertarik dengan isu-isu yang dibahas dalam tulisan jurnal ini. Namun demikian, redaksi juga menyadari atas masih banyaknya kekurangan dalam tulisan-tulisan yang tersaji dalam *Jurnal Politica* edisi kali ini, dan untuk itu, diharapkan masukannya dari para pembaca yang budiman demi perbaikan kualitas jurnal ini ke depan. Redaksi mengucapkan terima kasih kepada Dr. Lili Romli dan Dr. Ganewati Wuryandari, keduanya Peneliti Utama dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), serta Dr. Riant Nugroho (Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia) dan Dr. Yandri Kurniawan (Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Hubungan Internasional, Universitas Indonesia) yang telah memberikan kontribusinya sebagai mitra bestari melalui koreksi dan masukannya terhadap tulisan-tulisan yang tersaji dalam *Jurnal Politica* edisi kali ini.

Jakarta, Mei 2016
Redaksi

Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Poltak Partogi Nainggolan

Peran Kapital dan Gagalnya Konsolidasi Demokratis Indonesia:
Pendekatan Ekonomi-Politik

Kegagalan dalam memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap prospek demokratisasi di Indonesia telah dipertanyakan dalam tulisan ini. Dengan menggunakan pendekatan ekonomi-politik, penulis mempresentasikan sebuah analisis kritis mengenai perkembangan politik di Indonesia pasca-Soeharto. Penulis mengkritik para institusionalis, khususnya Indonesianis, yang mempertahankan cara pandang mereka dalam memahami Indonesia. Dibandingkan dengan institusionalisme, pendekatan ekonomi politik, menurut penulis, lebih menolong dalam memberikan penjelasan yang lebih baik mengapa modal atau politik uang semakin dominan mengontrol perkembangan politik Indonesia pasca-1998, sehingga telah menyebabkan kegagalannya dalam mewujudkan konsolidasi demokratis dalam beberapa tahun sesudahnya. Penulis mengemukakan mengenai pentingnya sebuah solusi sosialis atas praktek demokrasi liberal Barat dan model pembangunan kapitalisnya, serta neo-feodalisme, neo-liberalisme, dan bentuk-bentuk baru oligarki yang muncul di negara demokrasi baru seperti Indonesia. Dengan demikian, solusi terhadap permasalahan sistem politik dan kekuasaan di Indonesia tidak lagi bersifat institusional di permukaan, namun efektif menjawab akar permasalahannya.

Kata kunci: konsolidasi demokratis, politik Indonesia, peran kapital, dominasi modal, politik uang, perwakilan politik, institusionalisme, ekonomi politik.

Poltak Partogi Nainggolan

*The Role of Capital and The Failure of Indonesia's Democratic Transition:
A Political-Economy Approach*

The failure of having a proper understanding on the prospect of Indonesia's democratization has been discussed in this essay. Applying a political economy approach, the writer presents a critical analysis on the development of political situation in post-Soeharto Indonesia. He criticized institutionalists, particularly Indonesianists, in preserving their point of views in understanding the country's politics in post-colonial era. Rather than institutionalism, the political economy approach, the writer argues, is more helpful in giving clear explanations why capital or money politics more dominantly influences the Indonesian politics after 1998, which eventually causes its failure in realizing democratic consolidation several years afterwards. The writer offers 'a socialist solution' to the western practices of liberal democracy and its capitalist development model, in addition to neo-liberalism, neo-feudalism, and its new form of oligarchy in new emerging democracies such as Indonesia. Therefore, the solution to the problems of politics and power in Indonesia will be no longer artificial in nature, but it can effectively address the roots of the problem.

Keywords: democratic consolidation, Indonesian politics, capital role, capital domination, money politics, political representation, institutionalism, political economy.

Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Debora Sanur L

Upaya Penanggulangan Terorisme ISIS di Indonesia
dalam Melindungi Keamanan Nasional

Aksi-aksi terorisme terkait Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) membangunkan kewaspadaan banyak negara di dunia. Seperti juga negara lain, Indonesia menghadapi tantangan dalam menangani kelompok teroris yang tergabung dalam jaringan ISIS. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui perkembangan terorisme ISIS dalam mengancam keamanan nasional Indonesia. Tulisan ini sampai pada kesimpulan bahwa perkembangan ISIS sudah mengancam Indonesia. Karenanya, diperlukan strategi yang efektif untuk menanggulangi ancaman terorisme di Indonesia. Secara khusus, pemerintah harus segera meningkatkan kemampuan unit anti-terornya.

Kata kunci: Terorisme, ISIS, Keamanan Nasional, penanggulangan terorisme, Indonesia.

Debora Sanur L

War on Terror in Indonesia to Protect National Security

Terror activities organized by ISIS has rised alarm to many countries, in which Indonesia has also confronted similar challenges. This essay has a main objective to discuss the development of terrorist activities of the ISIS groups or networks, and how far they have threatened Indonesia and its national security. The writer reaches a conclusion that ISIS groups' activities here have led to real threat to the country. She suggests, therefore, the need to use an effective strategy to copy with ISIS threat in Indonesia. Specifically, she recommend that the government must immediately improve its anti-terrors units.

Keywords: Terrorism, ISIS, National Security, war on terror, Indonesia.

Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Prayudi

Partisipasi Politik Masyarakat dalam Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam
(Studi tentang Konsultasi Publik Masalah Pertambangan di Provinsi Bangka-Belitung
dan Provinsi Kalimantan Timur)

Partisipasi politik masyarakat di tengah maraknya izin pertambangan perlu memperoleh perhatian yang lebih serius. Melalui penggunaan metodologi kualitatif, penelitian mengenai masalah ini berupaya mengungkap partisipasi politik masyarakat dalam masalah pertambangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai politik pertambangan oleh pemerintah daerah dan dampaknya. Hasil penelitian menunjukkan, konsultasi publik mengenai kebijakan pertambangan masih lemah dampaknya bagi tata kelola kebijakan pertambangan yang baik penulis mengusulkan agar pengaturan utama masalah pertambangan di bawah UU Pemerintahan Daerah, dan jangan tersebar mengikuti pengaturan secara sektoral operasi pertambangan.

Kata kunci: partisipasi politik, konsultasi publik, usaha pertambangan, pemerintahan daerah, manajemen SDA, Bangka-Belitung, Kalimantan Timur.

Prayudi

*Community's Political Participation in Natural Resources Management:
Study on Public Consultation in Mining Business in the Bangka-Belitung and Kalimantan Timur Province*

Community's political participation amidst a dramatical increase of mining business in many Indonesia's regions should have serious attention. Applying qualitative methodology, this research is aimed to reveal community's political participation in mining, with an objective to gather information on regional government (Bangka-Belitung and Kalimantan Timur Provinces) policy in that business and its impacts. The result of the research discloses that public consultation still has a low impact to motivate the implementation of good governance in mining business. The writer suggests that mining regulation should be stipulated inside the law on regional government, not putting in various (related) laws.

Keywords: political participation, public consultation, mining, resources management, Bangka-Belitung, Kalimantan Timur.

Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Adirini Pujayanti

Peran Daerah dalam Diplomasi Ekonomi

Paradiplomasi dengan pelibatan pemerintah daerah sebagai bagian dari diplomasi multijalur Indonesia merupakan tuntutan riil dalam hubungan internasional di era globalisasi ini. Dalam paradiplomasi terdapat korelasi erat dan timbal balik antara dinamika hubungan internasional dan realitas domestik yang diperlukan untuk menempatkan substansi permasalahan diplomasi ekonomi secara integratif dan intermestik. Paradiplomasi di bidang ekonomi dapat menjadi bagian dari strategi kebijakan luar negeri Indonesia guna mencapai tujuan-tujuan ekonomi. Namun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa paradiplomasi belum berjalan secara efektif karena belum terpadunya kepentingan pusat dan daerah.

Kata kunci: paradiplomasi, diplomasi ekonomi, pemerintah daerah, Indonesia.

Adirini Pujayanti

The Role of Local Government in Economic Diplomacy

Paradiplomacy with the involvement of local governments as part of Indonesia's multi-track diplomacy is a real demand emerged to meet the realistic demand of international relations in the era of globalization. In paradiplomacy there is a close and reciprocal correlation between the dynamics of the international relations and Indonesia's domestic realities, which is required to set the subject matter of economic diplomacy in integrative and intermestic ways. Paradiplomacy in economics sector could be a part of Indonesia's foreign policy strategy in order to achieve economic goals. Nevertheless, the result of this study indicates that paradiplomacy has been ineffective because national and regional interests have not been integrated.

Keyword: paradiplomacy, economic diplomacy, local government, Indonesia.

Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Iwan Hermawan

Kebijakan Perberasan Indonesia dan Solidaritas Pangan ASEAN

Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan perkembangan kebijakan perberasan di Indonesia dan mengkaji solidaritas pangan ASEAN dalam mendukung ketersediaan beras di Indonesia. Metodologi yang digunakan adalah analisis deskriptif dan perhitungan sederhana, seperti tingkat rasio swasembada beras dan arus perdagangan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diterbitkan Comtrade, IMF, FAO, IRRI, BPS, Kementerian Pertanian, dan Bulog. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan perberasan mengalami perubahan secara dinamis mulai dari rezim Orla hingga saat ini. Kebijakan stabilisasi harga padi/beras menjadi kebijakan yang utama, namun cenderung ditujukan untuk menjaga inflasi atau kepentingan konsumen. Ketika ketersediaan beras melalui swasembada beras sulit diwujudkan, kerja sama pangan ASEAN menjadi opsi untuk mendukung kebijakan perberasan di Indonesia, khususnya dalam rangka mendukung stabilisasi harga.

Kata kunci: kebijakan perberasan, solidaritas pangan, Indonesia, ASEAN.

Iwan Hermawan

Indonesia's Rice Policy and ASEAN Food Solidarity

The objectives of this essay are to describe Indonesia's rice policy under different regimes and to analyse ASEAN food solidarity in supporting the country's rice availability. Methodology applied in this study is a descriptive analysis and simple calculation such as rice self-sufficiency ratio and trade flow. Secondary data used is from Comtrade, IMF, FAO, IRRI, BPS, Ministry of Agriculture, and Bulog. Its result indicates that rice policies in Indonesia dynamically developed through different regime. Further, rice stabilization becomes a major issue in order to secure inflation rate. When rice availability through self-sufficiency hard to achieve, food ASEAN cooperation becomes an option to support the country's rice policy, especially to support price stability.

Keywords: rice policy, food solidarity, Indonesia, ASEAN.

Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya

Simela Victor Muhamad

Isu Keamanan di Semenanjung Korea dan Upaya Damai Parlemen

Semenanjung Korea adalah kawasan strategis di Asia Timur yang masih menghadapi persoalan keamanan, akibat isu nuklir Korea Utara yang menimbulkan kecemasan negara-negara di sekitarnya. Ketegangan juga kerap terjadi di kawasan ini akibat aksi manuver militer dari masing-masing negara yang saling 'berlawanan' satu sama lain. Ketegangan di Semenanjung Korea menimbulkan keprihatinan internasional, karena berimplikasi luas terhadap stabilitas kawasan. Situasi keamanan di Semenanjung Korea yang tidak stabil berpotensi menimbulkan konflik terbuka, jika tidak ada upaya damai untuk mengatasinya. Parlemen, sebagai bagian dari masyarakat internasional, dan dalam kerangka diplomasi multi-jalur, seharusnya dapat mengambil peran dalam mendukung upaya damai di kawasan tersebut melalui diplomasi parlemen. Melalui studi kepustakaan, esai ini membahas upaya damai parlemen atas masalah keamanan di Semenanjung Korea, terutama dalam kerangka pelaksanaan diplomasi parlemen APPF, baik yang dilakukan secara kelembagaan maupun individual anggota parlemen.

Kata kunci: keamanan kawasan, diplomasi parlemen, Semenanjung Korea, Forum Parlemen Asia-Pasifik, APPF.

Simela Victor Muhamad

Security Issue in The Korean Peninsula and Parliament's Peace Initiatives

The Korean Peninsula is a strategic region in East Asia, which is still facing security problems because of North Korean nuclear issue, causing concern to surrounding countries. Tensions also often occur due to military maneuvers of that cannot be justified by both countries that are "contrary" each other. Tension on the Korean Peninsula raises international concern due to its implications to regional stability. The unstable situation in the Korean Peninsula could lead to an open conflict, if there is no peaceful means to resolve it. Parliament, as part of the international community, and within the framework of multi-track diplomacy, should actually play a role in supporting peace efforts in the region through parliamentary diplomacy. Through library studies, this essay attempts to discuss parliament's peace efforts on security issues in the Korean Peninsula, especially within the framework of APPF parliamentary diplomacy, based on institutional or individual approach.

Keywords: regional security, parliamentary diplomacy, Korean Peninsula, Asia-Pacific Parliamentary Forum, APPF.